



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA PPN PEMANGKAT TRIWULAN I TAHUN 2024



kkp.go.id/djpt/ppnpemangkat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur diucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I 2024 Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dapat diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Triwulan I 2024 ini sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja dan program yang telah dilaksanakan untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan pedoman pelaksanaan capaian kinerja pada tahun berikutnya. Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I 2024 masih terdapat beberapa kekurangan termasuk capaian kinerja yang belum tercapai, sehingga saran dan masukan serta dukungan dari seluruh pegawai PPN Pemangkat maupun kerjasama dari *stakeholder* dapat melengkapi dan menyempurnakan laporan kinerja yang dimaksud.

Demikian laporan ini disusun, semoga dapat bermanfaat bagi institusi PPN Pemangkat pada khususnya, dan masyarakat nelayan pada umumnya

Sambas, 18 April 2024

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Pemangkat,



Anam Tofani, S.Pi, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Triwulan I 2024 Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh selama Triwulan I 2024. Sebagai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat telah menyusun Laporan Kinerja sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk Tahun Anggaran 2024.

Laporan Kinerja Triwulan I 2024 Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat menggambarkan target dan capaian kinerja serta penyajian hasil pengukuran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum, terdapat 7 indikator kinerja yang ditargetkan pelaksanaannya pada triwulan I dan capaian telah melampaui target yang ditentukan dengan Nilai Kinerja Organisasi 109,62 (Kategori Baik)



Pada laporan ini tersaji analisis capaian yang diperoleh dibandingkan dengan target yang telah ditentukan, selanjutnya dibandingkan dengan capaian pada IKU yang sama pada triwulan I tahun 2020 s.d. 2023 dan target Rensta 2020-2024, dibandingkan capaian kerja dengan standar nasional; dalam hal ini dibandingkan dengan PPN Sungailiat dengan rasionalisasi masih dalam satu WPP yang sama yakni WPP 711 (Zona I); selain itu juga disajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi dan kegiatan penunjang yang telah dilakukan dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dan manusia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat ini dapat memberikan manfaat bagi perbaikan dan peningkatan kinerja masa yang akan datang. Kami berharap kinerja yang telah dicapai pada triwulan I tahun 2024 dapat terus ditingkatkan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. Gambaran Umum	7
1.2. Kedudukan	8
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	9
1.4. Visi, Misi dan Tujuan.....	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
2.1. Perencanaan Kinerja	14
2.2. Perjanjian Kinerja.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Sasaran Strategis Perikanan Tangkap	19
3.2. Sasaran Strategis PPN Pemangkat.....	20
3.3. Capaian Kinerja PPN Pemangkat.....	22
3.4. Uraian Capaian Kinerja PPN Pemangkat	25
IK. 1. Penerimaan PNBPN di PPN Pemangkat (Rp. Juta)	25
IK. 2. Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pemangkat (Ton)	27
IK. 3. Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisis dan/atau Dievaluasi (Persen)	29
IK. 4. Tingkat Kinerja PPN Pemangkat (Nilai)	30
IK. 5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan (Persen)	33
IK. 6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (Persen).....	34
IK. 7. Nilai Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (Persen).....	36
IK. 8. Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan.....	38
IK. 9. Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)	40
IK. 10. Nilai PM Pembangunan ZI PPN Pemangkat.....	42
IK. 11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Pemangkat.....	43
IK. 12. Nilai Rekonsiliasi Kinerja PPN Pemangkat (Nilai)	46
IK. 13. Indeks Profesionalitas ASN PPN Pemangkat (Persen)	48
IK. 14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Pemangkat (Nilai).....	49
IK. 15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen).....	51
IK. 16. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	53

IK. 17 Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	54
IK. 18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup PPN Pemangkat	56
3.5. Akuntabilitas Keuangan	58
BAB IV PENUTUP	65
3.1. Kesimpulan.....	66
3.2. Tindak lanjut atas rekomendasi sebelumnya.....	66
3.3. Rekomendasi tindak lanjut.....	67



BAB I PENDAHULUAN

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM

Secara Geopolitis lokasi PPN Pemangkat memiliki nilai strategis, berada di garda depan Laut Natuna Utara, dan berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam. Konsekuensinya memberikan implikasi positif dan negatif. Implikasi positif memiliki akses pasar luar negeri yang menjanjikan dan implikasi negatif rawan terhadap pelanggaran dan pencurian ikan oleh kapal ikan asing.

Sebagai pelabuhan perikanan yang berada dilingkar luar, perannya harus dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas fasilitas pelabuhan agar dapat memfasilitasi perkembangan usaha penangkapan ikan yaitu sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan, tempat berlabuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, tempat pemasaran dan pembinaan mutu hasil perikanan, pusat pengumpulan data dan penyuluhan, serta pusat pelayanan informasi. Salah satu upaya tersebut adalah melakukan kegiatan pengembangan prasarana perikanan tangkap dilingkar luar wilayah Indonesia (*outer ring fishing port*) dalam rangka memberikan pelayanan sesuai dengan standar prosedur manajemen operasional (*good operation and management practice*) dan dapat menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat perikanan (*one-stop shopping fishing port*).

Secara krusial dari beberapa pemanfaatan sumberdaya ikan sudah berada dalam kondisi *overexploited*, seperti udang penaeid, lobster dan cumi-cumi. Kendatipun demikian, sumberdaya ikan demersal, pelagis kecil, pelagis besar dan ikan karang konsumsi masih terbuka peluang untuk dimanfaatkan secara optimal.

Memperhatikan potensi sumberdaya ikan dan lingkungannya, sumberdaya manusia serta permintaan pasar dalam dan luar negeri yang dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang semakin menggembirakan untuk produk-produk perikanan seiring pertambahan jumlah penduduk dunia dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ikan sebagai sumber protein yang menyehatkan dan bebas kolesterol, maka sangat memungkinkan untuk membangun industri perikanan

yang kokoh, mandiri dan berkelanjutan serta memperluas penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan nelayan, meningkatkan konsumsi ikan dalam negeri serta meningkatkan penerimaan devisa Negara yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya suatu perumusan kebijakan pembangunan perikanan tangkap nasional yang tepat, terarah, terpadu dan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Guna mewujudkan sasaran pembangunan perikanan tangkap sebagaimana dijelaskan pada alenia di atas, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah membangun berbagai prasarana perikanan yang menyebar hampir di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berupa pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan tangkap.

Perkembangan armada kapal perikanan yang berada di PPN Pemangkat dan sekitarnya selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan jumlah yang terus meningkat dengan ukuran kapal yang semakin besar. Kecenderungan peningkatan ini diprediksi akan terus berlangsung pada masa yang akan datang. Terutama sebagai akibat kenaikan bahan bakar yang berpengaruh langsung terhadap efisiensi operasional penangkapan ikan, khususnya bagi kapal ukuran diatas 30 GT yang beroperasi di WPPNRI 711 (Zona I) akan melakukan relokasi pelabuhan pangkalan dari pulau Jawa (Jakarta, Pekalongan dan Pati) ke wilayah yang berdekatan dengan *fishing ground*, diantaranya ke PPN Pemangkat.

Tumbuh dan berkembangnya usaha perikanan tangkap di PPN Pemangkat harus didukung oleh kegiatan usaha penunjang berupa industri pendukung dalam kawasan pelabuhan. Antara lain industri galangan kapal, industri perakitan alat tangkap, industri perbankan, industri pengolahan hasil perikanan, suplai perbekalan (air, es dan BBM), sektor pariwisata dan perdagangan.

1.2. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Pelabuhan Perikanan adalah Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur

Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun dasar hukum pengelolaan pelabuhan perikanan antara lain :

- a. Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- b. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1985 tentang Pembinaan Kepelabuhanan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang perubahan tarif atas jenis PNBP yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan; dan
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pasal 41 A, Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Maka fungsi pelabuhan perikanan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya dapat berupa:

- a. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- b. pelayanan bongkar muat
- c. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;\
- d. pemasaran dan distribusi ikan;
- e. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- f. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- g. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- h. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
- i. pelaksanaan kesyahbandaran;
- j. tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- k. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- l. tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;

- m. pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; dan/atau pengendalian lingkungan.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas “Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan”. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut pelabuhan perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang Pelabuhan perikanan;
- b. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan perikanan;
- c. pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan logbook penangkapan ikan;
- e. pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
- f. pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- g. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- j. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
- k. pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
- m. pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
- n. pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan perikanan; dan
- o. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.4. VISI, MISI DAN TUJUAN

Visi

Selaku Unit Pelaksana Teknis Perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan mengarah pada tujuan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat maka Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat menetapkan visi yaitu “Terwujudnya Pusat Industri Perikanan Tangkap di Kalimantan Barat agar Tercapai Pelabuhan Perikanan yang Maju, Berkelanjutan menuju Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera”.

Berdasarkan visi tersebut dapat diartikan bahwa kawasan PPN Pemangkat merupakan titik sentral bagi pertumbuhan dan pengembangan kegiatan industri perikanan mulai dari sub sistem penyediaan sarana produksi dan pengolahan hasil perikanan serta sub sistem pemasaran produk. Di sisi lain dalam operasionalnya juga senantiasa mengutamakan pelayanan publik guna mendukung peningkatan produktifitas nelayan dan pengusaha perikanan serta menjaga keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan tingkat kelestariannya.

Misi

Untuk dapat mencapai Visi yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan tingkat operasional pelabuhan yang secara nyata telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap kegiatan ekonomi perikanan, maka PPN Pemangkat mengemban misi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan zona integritas sesuai standar ISO 9001:2015;
2. Peningkatan kompetensi nelayan di pelabuhan perikanan;
3. Peningkatan kontribusi ekonomi melalui investasi dan pelayanan usaha di pelabuhan perikanan;
4. Peningkatan keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap melalui penyiapan data dan informasi di pelabuhan perikanan yang akurat;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pembinaan SDM dan pengelolaan anggaran yang profesional dan akuntabel.

Tujuan

Menjabarkan misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap di pelabuhan perikanan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan zona integritas (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan penerapan ISO 9001:2015 dengan melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya kerja sebagai alat ukur peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat;
2. Peningkatan Kompetensi nelayan di PPN Pemangkat dengan melaksanakan bimbingan teknis baik penangkapan ikan, keselamatan pelayaran dan mutu hasil perikanan yang difasilitasi program internal maupun program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
3. Peningkatan investasi dan pelayanan usaha di pelabuhan perikanan dengan melakukan sosialisasi, promosi dan peningkatan fasilitas pelabuhan untuk meningkatkan peluang usaha di PPN Pemangkat;
4. Menyiapkan data dan informasi pelabuhan perikanan yang akurat dengan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Penyelenggaraan sistem kepegawaian dan pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi.

BAB II

PERENCANAAN DAN

PERJANJIAN KINERJA

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh PPN Pemangkat sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan perikanan tangkap. Adapun perencanaan dan perjanjian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Perencanaan Kinerja 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Rp juta)	957,31
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Meningkat	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Ton)	12.132
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang Berdaya Saing	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100
		Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	84
		Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang optimal	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	40
		Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	30,10
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	490

6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (persen)	12
---	---	--	----

7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Nilai)	80
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	80
		Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	94
		Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (indeks)	84
		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	80
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	80
		Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	93,76
		Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	86
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Indeks)	88,30

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan unit kerja yang lebih tinggi kepada pimpinan unit kerja yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target yang harus dicapai dalam periode tertentu. Perjanjian kinerja PPN Pemangkat pada tahun 2024 dilaksanakan antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan Kepala PPN Pemangkat.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Anam Tofani**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2024

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perikanan
Tangkap

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Pemangkat

Anam Tofani

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Rp juta)	957,31
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Meningkat	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Ton)	12.132
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang Berdaya Saing	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	84
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang optimal	6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	40
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	30,10
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	490
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Tertindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (persen)	12
7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Nilai)	80
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	80
		12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	94
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Indeks)	84
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	80
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	80
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	93,76
		17	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	86
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Indeks)	88,30

Gambar 1. Perjanjian Kinerja 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. SASARAN STRATEGIS PERIKANAN TANGKAP

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh DJPT sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Adapun Sasaran Program Level I DJPT 2024 yaitu :

1. Kesejahteraan nelayan meningkat, dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai Tukar Nelayan (NTN);
2. Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan, dengan indikator kinerja:
 - a. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)
3. Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkat, dengan indikator kinerja
 - a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap; dan
 - b. Tenaga Kerja yang terlibat pada sektor perikanan tangkap.
4. Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab, dengan indikator kinerja
 - a. WPPNRI yang Melaksanakan Penangkapan Ikan Terukur
5. Produktivitas Perikanan Tangkap meningkat, dengan indikator kinerja
 - a. Produksi perikanan tangkap
6. Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap, dengan indikator kinerja
 - a. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan DJPT;
 - b. Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan DJPT;
 - c. Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis di lingkungan DJPT;
 - d. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan DJPT;
 - e. Tingkat kepatuhan BMN di lingkungan DJPT;
 - f. Unit kerja berpredikat menuju WBK di lingkungan DJPT;
 - g. Penilaian mandiri SAKIP di lingkungan DJPT;

- h. Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJPT;
- i. Indeks profesionalitas ASN di lingkungan DJPT;
- j. Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan DJPT;
- k. Persentase unit kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar di lingkungan DJPT;
- l. Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan DJPT;
- m. Tingkat kepatuhan pengelolaan data di lingkungan DJPT;
- n. Indikator pelaksanaan anggaran di lingkungan DJPT; dan
- o. Nilai kinerja anggaran di lingkungan DJPT (level)

3.2. SASARAN STRATEGIS PPN PEMANGKAT

Sasaran kinerja yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja PPN Pemangkat yang dilaksanakan melalui program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebagaimana tersaji berikut:

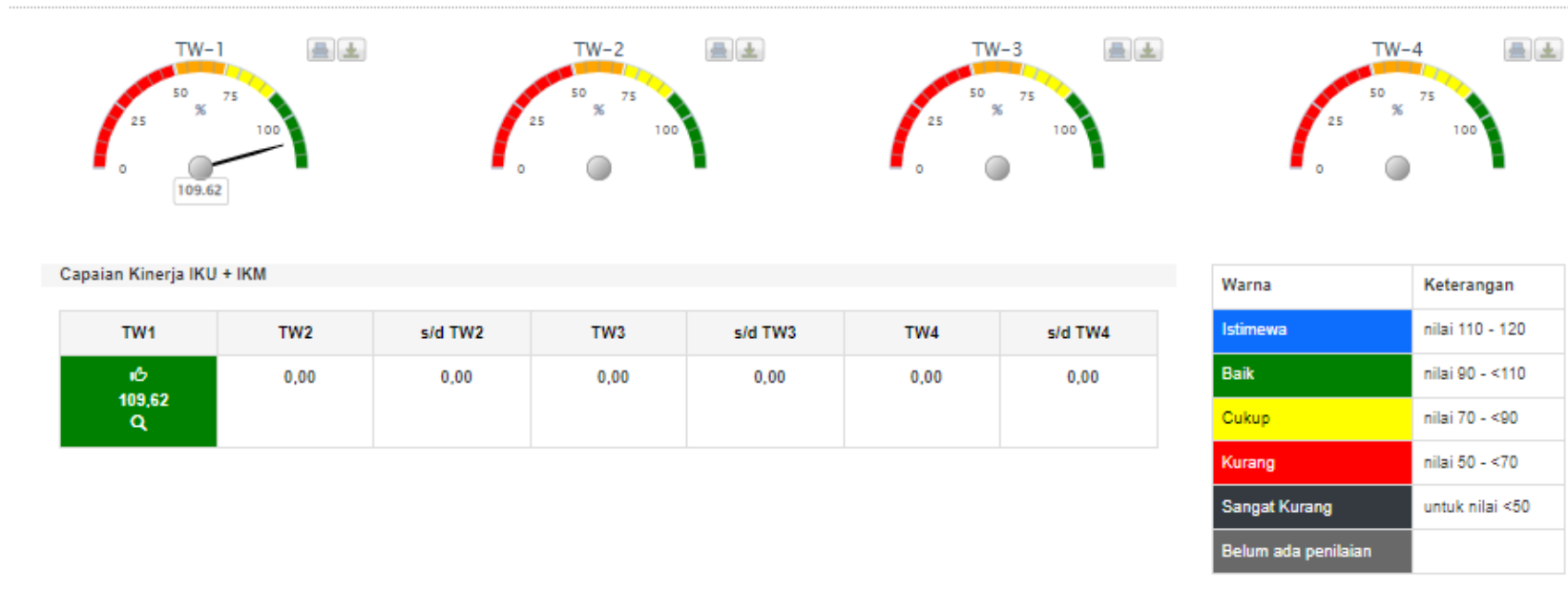
Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Rp juta)	957,31
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Meningkat	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Ton)	12.132
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang Berdaya Saing	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	84
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang optimal	6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	40
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	30,10
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	490
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (persen)	12
7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Nilai)	80
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	80
		12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	94
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Indeks)	84
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	80
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	80
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	93,76
		17	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	86
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Indeks)	88,30

3.3. CAPAIAN KINERJA PPN PEMANGKAT

Capaian kinerja PPN Pemangkat secara periodik dinilai melalui website resmi kinerja lingkup KKP (kinerjaku.go.kkp.id). Capaian nilai triwulan I tergambar sebagai gambar 4 berikut. Pada triwulan I capaian kinerja PPN Pemangkat mendapatkan predikat **Baik**



Gambar 4. Capaian Kinerja 2024

Capaian kinerja merupakan pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam sasaran kinerja PPN Pemangkat. Adapun capaian kinerja PPN Pemangkat triwulan I Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Rincian Capaian Kinerja Triwulan I 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Target Triwulan I 2024	Capaian	%
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Rp juta)	957,31	180	192,66	107,03
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Meningkat	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Ton)	12.132	1.500	1.652	110,13
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang Berdaya Saing	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100	-	-	-
		Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	84	84	89,6	106,67
		Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100	-	-	-
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang optimal	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	40	-	-	-
		Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	30,10	30,10	95,68	120,00
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	490	460	475	103,26
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (persen)	12	-	-	-
7		Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Nilai)	80	-	-	-

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	80	80	100	120,00
	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	94	-	-	-
	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (indeks)	84	-	-	-
	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	80	-	-	-
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	80	-	-	-
	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	93,76	-	-	-
	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	86	-	-	-
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Indeks)	88,30	88,30	89,4	101,25

3.4. URAIAN CAPAIAN KINERJA PPN PEMANGKAT

Dalam bab ini dijelaskan capaian setiap indikator kinerja terhadap

1. Target yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian kinerja;
2. Perbandingan capaian kinerja pada IKU yang sama pada triwulan I tahun 2020 s.d. 2023;
3. Perbandingan dengan target renstra 2020-2024;
4. Perbandingan capaian kerja dengan standar nasional; dalam hal ini dibandingkan dengan PPN Sungailiat dengan rasionalisasi masih dalam satu WPP yang sama yakni WPP 711 (Zona I).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi dan kegiatan penunjang yang telah dilakukan; dan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dan manusia.

SS.1 Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap meningkat di PPN Pemangkat

Indikator Kinerja (IK) pada Sasaran Kinerja 1 yaitu Penerimaan PNBPN di PPN Pemangkat

IK. 1. Penerimaan PNBPN di PPN Pemangkat (Rp. Juta)

Indikator nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pendapatan yang diperoleh pelabuhan yang berasal dari pelayanan jasa yang berada di Pelabuhan Perikanan, baik penerimaan fungsional maupun penerimaan umum. Perhitungan indikator ini yaitu nilai akumulasi Penerimaan atas jasa-jasa bulan berjalan. Berikut Capaian Indikator Kinerja Nilai PNBPN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat triwulan I Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Capaian IK Penerimaan PNBPN di PPN Pemangkat

SS-1				Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pemangkat							
IKU-1				Penerimaan PNBPN di PPN Pemangkat (Rp. Juta)							
Realisasi Triwulan I				2024					Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2024	%Capaian thd Target 2024	
135	117	206	251	957	180	192,66	20	107	1.000	19	

Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2024 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 180 Juta, berhasil dicapai dengan realisasi sebesar Rp. 192.661.031,- dengan persentase sebesar 107%. Jika dibandingkan dengan target tahunan, maka persentasenya sebesar 20%.

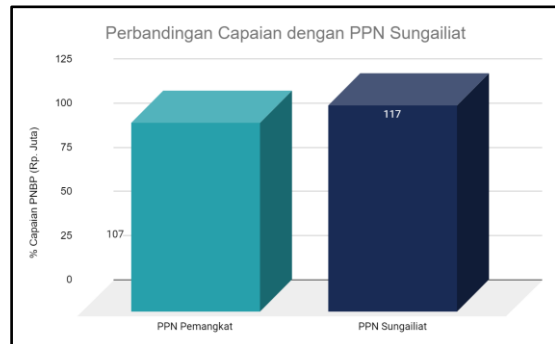
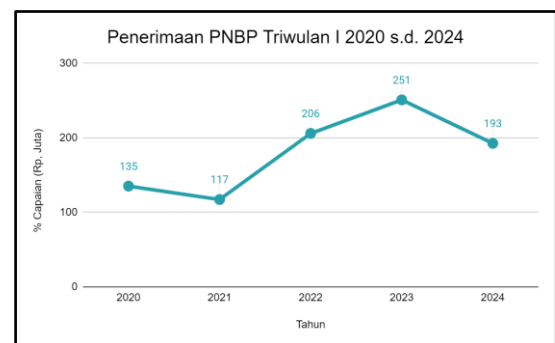
Perbandingan capaian dari tahun 2020 s.d. 2024 sebagaimana tergambar pada diagram disamping, terlihat tren kenaikan capaian dari tahun 2020 s.d. 2024, puncaknya pada triwulan I tahun 2023.

Target pada Renstra untuk IK PNBPN di PPN Pemangkat pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.000 Juta. Persentase capaian jika dibandingkan target Renstra adalah sebesar 19%.

Indikator kinerja PNBPN ini dilaksanakan oleh semua UPT lingkup DJPT. Capaian indikator kinerja PNBPN PPN Pemangkat jika dibandingkan dengan capaian pada indikator yang sama pada PPN Sungailiat maka tergambar sebagaimana gambar disamping. Persentase capaian PNBPN pada PPN Pemangkat lebih rendah dibandingkan dengan persentase capaian pada PPN Sungailiat.

Capaian ini dikarenakan peran serta seluruh komponen mulai dari petugas pelayanan dan pengguna jasa yang berada di lingkungan PPN Pemangkat. Selain itu, untuk PNBPN Non SDA terdapat perbaikan data dan system dalam pendataan sehingga data yang dicapai menjadi akuntabel.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU ini disebabkan oleh kinerja ASN (PNS dan PPPK) yang membaik sehingga pelayanan yang dulu belum ditangani



secara optimal, saat ini dengan system yang baru berdampak pada peningkatan pelayanan menjadi lebih baik. Dari sisi anggaran, untuk mendukung IKU ini terdapat pagu anggaran sebesar Rp. 117.900.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 31.560.500,00 atau persentase realisasi sebesar 26,77%.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan tercapainya peningkatan IKU ini diantaranya adalah :

1. Penggunaan aplikasi JALA PUKAT untuk pemungutan jasa kepelabuhanan (Pengadaan Air Bersih, Sewa Alat Berat, Listrik, Pas Masuk), dengan aplikasi tersebut data jasa kepelabuhanan dapat berekonsiliasi dengan baik;
2. Penggunaan aplikasi SIJAKA untuk penarikan jasa Tambat Labuh di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat;
3. Penertiban Pas Masuk di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat.

Dalam hal penertiban pas masuk terdapat permasalahan yang dihadapi yakni kurang efektif dan efisiennya sistem, karena masih menggunakan sistem manual. Rekomendasinya adalah kedepan supaya ada peningkatan sistem pas masuk menggunakan portal semi otomatis.

SS.2 Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pemangkat meningkat

Indikator Kinerja (IK) pada Sasaran Kinerja 2 yaitu Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pemangkat (Ton)

IK. 2. Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pemangkat (Ton)

Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat merupakan indikator kinerja yang menunjukkan jumlah volume produksi perikanan tangkap yang didaratkan kapal penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dengan pengukuran jumlah volume produksi perikanan tangkap yang didaratkan oleh kapal penangkapan ikan di PPN Pemangkat. Berikut capaian indikator Jumlah Produksi Perikanan Tangkap periode tiwulan I tahun 2024 sebagaimana tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Capaian IK Volume Produksi Perikanan Tangkap 2024

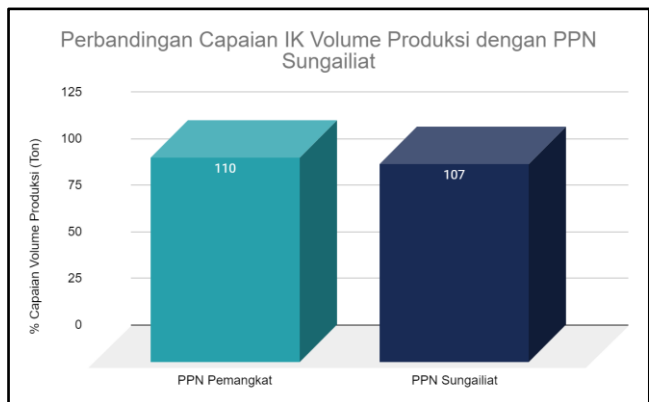
SS-2	Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Pemangkat Meningkat
IKU-2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Pemangkat (Ton)

Realisasi Triwulan I				2024					Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2024	%Capaian thd Target 2024
1.420	1.919	1.350	2.215	12.132	1.500	1.652	14	110	8.850	19

Capaian pada IK Volume Produksi Perikanan Tangkap ini sampai dengan akhir Maret 2024 sebesar 1.652 Ton. Target untuk triwulan I sebesar 1.500 Ton, sehingga persentase capaiannya adalah 110%. Jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar 12.132 Ton, maka persentase capaiannya adalah 14%.



Indikator kinerja ini telah dilaksanakan secara lima tahun berturut-turut, adapun perbandingan capaiannya tampak fluktuatif sebagaimana gambar disamping.



Target indikator kinerja ini pada renstra sebesar 8.850 Ton, selisih 3.282 Ton lebih sedikit dibanding dengan target tahunan. Realisasi pada triwulan I ini jika dibandingkan target renstra maka persentasenya adalah 19%.

Berdasarkan pencapaian realisasi, jika dibandingkan dengan beberapa UPT Pusat lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka capaian Volume Produksi PPN Pemangkat masih lebih besar jika dibandingkan PPN Sungailiat.

Penyebab keberhasilan peningkatan kinerja pada IKU ini adalah pencatatan data produksi dengan baik melalui system *online* (Aplikasi PEDATI) setiap kapal yang melakukan pembongkaran di dermaga maupun kapal angkut ikan yang masuk dari pelabuhan lain (*port to port*) tercatat dengan baik serta ikan yang masuk melalui pengangkutan dari darat.

Dalam mendukung pencapaian target volume produksi, didukung dengan anggaran dan sumber daya manusia. Peningkatan kinerja petugas data dan keaktifan penginputan pada aplikasi PIPP yang mengakibatkan pendataan produksi membaik. Dari segi anggaran, untuk mendukung kegiatan pada IKU ini terdapat pagu anggaran sebesar Rp. 234.792.000,00, dengan rincian kegiatan pendukung diantaranya adalah Evaluasi Pelaksanaan PNBP Pasca Produksi dan Penangkapan Ikan Terukur di Pelabuhan Perikanan, Penyelenggaraan, pengolahan dan validasi data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, dan Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional. Sampai dengan akhir triwulan I telah terealisasi sebesar Rp. 21.123.100,00 atau dengan persentase sebesar 9%.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian adalah adanya

1. Penggunaan aplikasi DAPOOR untuk penyediaan data Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat;
2. Penggunaan aplikasi PEDATI untuk pendataan hasil pembongkaran ikan; dan
3. Penggunaan aplikasi PIPP.

SS.3 Pengelolaan PPN Pemangkat yang Berdaya Saing

Terdapat 3 Indikator Kinerja (IK) pada Sasaran Kinerja 3 yaitu Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisis dan/atau Dievaluasi, Tingkat Kinerja PPN Pemangkat (Nilai) dan Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan (Persen).

IK. 3. Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisis dan/atau Dievaluasi (Persen)

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan. Fungsi pengusahaan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan. Sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 jenis PNBP yang berlaku di KKP diantaranya meliputi penerimaan dari Pelabuhan Perikanan, diantaranya melalui sewa lahan/gedung/bangunan yang mana dalam prosesnya diperlukan analisis atau evaluasi permohonan pengusahaan. Penanggung

jawab indikator kinerja ini adalah Tim Kerja TKPU, adapun pelaporannya bersifat tahunan, sehingga realisasi capaian belum dapat tersaji dalam laporan triwulan I.

Tabel 6. Capaian IK Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisis dan/atau Dievaluasi

SS-3				Pengelolaan PPN Pemangkat yang Berdaya Saing							
IKU-3				Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisis dan/atau dievaluasi (Persen)							
Realisasi Triwulan I				2024					Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2024	%Capaian thd Target 2024	
-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru pada triwulan IV tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya baik dengan tahun sebelumnya di triwulan I, dengan target renstra dan dengan skala nasional.

Tingkat ketercapaian IKU ini pada tahun 2023 adalah 100% hal ini dikarenakan adanya pendelegasian yang jelas terhadap pegawai yang menangani, monitoring dari ketua tim kerjanya dan tanggung jawab serta komitmen pegawai yang bersangkutan, hal ini tercermin dalam laporan SKP.

Bercermin pada pelaksanaan IKU ini pada tahun 2023 yang tanpa anggaran karena baru ada di triwulan keempat 2023, maka pada tahun 2024 telah dianggarkan pagu untuk pelaksanaan IKU ini, yakni sejumlah Rp.41.790.000,00.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU ini adalah adanya

1. Melakukan evaluasi dan rekap data jangka waktu kontrak perusahaan di lingkup PPN Pemangkat secara berkala oleh petugas; dan
2. Kegiatan Evaluasi Penggunaan Fasilitas dan Penggunaan Sistem Informasi Perusahaan (SIPAUS);

IK. 4. Tingkat Kinerja PPN Pemangkat (Nilai)

Indikator kinerja PPN Pemangkat merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015

tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008).

Pengukuran terhadap capaian indikator Tingkat Kinerja adalah berdasarkan hasil rata-rata nilai evaluasi pada aplikasi PIPP selama triwulan I 2024 dengan kriteria sebagai berikut

1. Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)
2. E-logbook
3. Aplikasi SPB-online
4. SHTI
5. Realisasi Penyerapan Anggaran
6. Pendapatan Pelabuhan
7. Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan
8. Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan
9. Panjang Dermaga
10. Kedalaman Kolam
11. Sarana Perbaikan (*docking*, bengkel)
12. Kelengkapan Fasilitas Pemasaran dan Distribusi Ikan
13. Ketersediaan Lahan Pelabuhan
14. Pelayanan Tambat Labuh
15. Produksi Perikanan
16. Frekuensi Kunjungan Kapal
17. STBLK
18. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
19. Fasilitas Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi
20. Pelaksanaan K5
21. Penyaluran Air Bersih (kapal dan industry pengolahan)
22. Penyaluran Es (Kapal)
23. Penyaluran BBM (kapal)
24. Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP
25. Pemanfaatan Lahan Pelabuhan
26. Penyerapan tenaga Kerja
27. Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan

Capaian kinerja IK tersebut tersaji dalam tabel 7 berikut

Tabel 7. Capaian IK Kinerja PPN Pemangkat

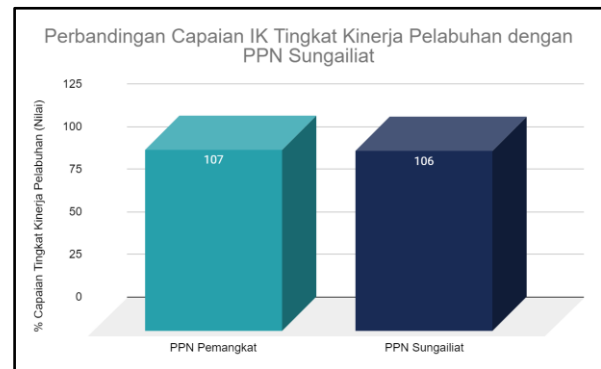
SS-3				Pengelolaan PPN Pemangkat yang Berdaya Saing							
IKU-4				Tingkat Kinerja PPN Pemangkat							
Realisasi Triwulan I				2024					Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2024	%Capaian thd Target 2024	
80	81	84,75	88,6	84	84	89,6	107	107	84	107	

Berdasarkan tabel di atas, didapat bahwa realisasi capaian IKU Tingkat Kinerja adalah 89,6 atau persentase capaian sebesar 107% dari target triwulan I yang telah ditentukan. Perlu disampaikan bahwa target triwulan, tahunan maupun target renstra adalah sama yakni 84.

Jika dibandingkan dengan capaian triwulan I pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 maka terlihat tren kenaikan sebagaimana gambar disampaing.



Berdasarkan pencapaian realisasi, jika dibandingkan dengan PPN Sungailiat, capaian tingkat kinerja PPN Pemangkat berada satu tingkat lebih tinggi jika dibanding PPN Sungailiat.



Indikator ini dapat tercapai karena adanya pendataan yang membaik dan penginputan di aplikasi PIPP yang aktif petugas.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU ini adalah dengan bertambahnya SDM (PPPK dan petugas data) sehingga dapat terbantu dalam hal penginputan kegiatan operasional pelabuhan pada aplikasi PIPP. Dari segi anggaran, terdapat pagu sebesar Rp.202.680.000,00 untuk operasional kegiatan mendukung IKU Tingkat Kinerja Pelabuhan, kegiatan diantaranya adalah Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan, Pelaksanaan tata kelola dan operasional cara penanganan ikan yang baik (CPIB) dan Inspeksi Pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan, Penerapan ISO 9001:2015 di Pelabuhan Perikanan, Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan) dan Sarana penunjang pemungutan PNBP Pelabuhan Perikanan. Sampai

dengan akhir triwulan I 2024 telah terealisasi sebesar Rp 12.853.500,00 atau dengan persentase sebesar 6%

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU ini adalah dengan

1. peningkatan kompetensi petugas operator aplikasi PIPP melalui Bimtek;
2. Penggunaan aplikasi DAPOOR untuk penyediaan data Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat;
3. Penggunaan aplikasi PEDATI untuk pendataan hasil pembongkaran ikan; dan
4. Peng-*entry-an* data hasil produksi perikanan yang secara kontinyu pada aplikasi PIPP.

IK. 5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan (Persen)

Indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan merupakan indikator yang menunjukkan jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan, jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan yang diterbitkan dan jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan yang diterbitkan. Adapun pembobotannya adalah sebagai berikut

1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%);
2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%); dan
3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%).

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru ada pada triwulan IV 2023. Sesuai dengan manual IKU, periode pelaporan IKU ini adalah tahunan, sehingga capaian IKU ini belum dapat tersaji pada laporan triwulan I kali ini

Tabel 8. Capaian IK Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan

SS-3				Pengelolaan PPN Pemangkat yang Berdaya Saing							
IKU-5				Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan (Persen)							
Realisasi Triwulan I				2024					Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2024	%Capaian thd Target 2024	
-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	

Indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan merupakan indikator baru yang ada pada triwulan keempat 2023, sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan tahun-tahun sebelumnya. Begitu juga halnya dengan target tahunan dan dengan target renstra tidak dapat dibandingkan karena periode pelaporan IKU ini bersifat tahunan. Pelaksanaan indikator ini secara serentak dilaksanakan secara tahunan oleh semua UPT lingkup DJPT, sehingga tidak dapat dibandingkan capaian pada PPN Sungailiat.

Dalam mendukung pencapaian IKU ini, pagu anggaran telah disiapkan sebesar Rp. 304.999.000,00. Adapun peruntukannya antara lain untuk kegiatan Pelaksanaan Tata kelola dan Operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan dan Pengumpulan dan Verifikasi Data Log Book penangkapan Ikan. Sampai dengan akhir triwulan I 2024, telah terealisasi beberapa kegiatan dengan angka serapan sebesar Rp17.919.600,00 atau dengan persentase serapan sebesar 5%.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian ini adalah

1. Penggunaan aplikasi Teman SPB dalam pelayanan kesyahbandaran;
2. Petugas secara rutin melakukan rekonsiliasi data SPB, STBLK dan SHTI; dan
3. Petugas melakukan pelayanan dengan baik pada pengguna jasa.

SS.4. Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas PPN Pemangkat yang Optimal

Terdapat 2 Indikator Kinerja (IK) pada Sasaran Kinerja 4 yaitu Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (Persen) dan Nilai Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (Persen)

IK. 6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (Persen)

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar

muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya. Indikator ini merupakan indikator kinerja baru sesuai dengan perubahan perjanjian kerja kedua. Adapun perhitungannya didasarkan pada persentase pengembangan fasilitas yang telah dilakukan dibandingkan dengan *master plan* yang dimiliki oleh PPN Pemangkat. Pengukuran indikator ini bersifat tahunan sehingga hasil pengukuran belum dapat tersaji dalam laporan triwulan I 2024.

Tabel 9. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (Persen)

SS-4				Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas PPN Pemangkat yang Optimal							
IKU-6				Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (Persen)							
Realisasi Triwulan I				2024				Renstra 2020-2024			
2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2024	%Capaian thd Target 2024	
-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	

Pada tahun 2024 PPN Pemangkat memiliki target IKU Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas pelabuhan perikanan sebesar 40 persen. Sesuai dengan manula IKU periode pelaporannya secara tahunan, sehingga belum bisa diukur capaiannya baik dengan target triwulanan, target tahunan dan target pada renstra. Pelaporan IKU ini dilakukan oleh seluruh UPT lingkup DJPT secara serentak pada akhir tahun, sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada PPN Sungailiat.

Bercermin pada keberhasilan PPN Pemangkat dalam IKU Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas pelabuhan perikanan karena telah dilakukan perbaikan dan pemeliharaan fasilitas pada tahun 2023 dengan baik seperti pengadaan dan pemeliharaan lampu jalan, pemeliharaan jalan komplek, perbaikan dan penambahan jaringan (*bandwidth*) internet, pemeliharaan dan penambahan jaringan CCTV, perbaikan *drainase*, pemeliharaan dan perbaikan jaringan air bersih, pemeliharaan dermaga dan pemeliharaan pagar keliling.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU Persentase Pengendalian Pengendalian Pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan ini disebabkan bertambahnya SDM dari penambahan ASN (PNS dan PPPK) sehingga dapat berkerja dengan baik. Selain itu adanya pembagian tugas kepada anggota Tim Kerja TKPU sebagai penanggung jawab untuk setiap item pekerjaan. Dari segi anggaran, untuk mendukung kegiatan pada IKU ini terdapat pagu anggaran sebesar Rp. 1.505.518.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 102.610.662,00 atau dengan persentase sebesar 6%. Anggaran tersebut telah digunakan untuk kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Pengadaan dan Rehabilitasi prasarana perkantoran.

IK. 7. Nilai Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (Persen)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formula UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat menyelenggarakan kegiatan pengendalian lingkungan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan perikanan yang mengoperasikan Pelabuhan perikanan harus: 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan. SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor pelabuhan. Indikator Nilai Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan merupakan indikator yang baru ada pada perjanjian kerja kedua. Capaian indikator tersaji pada tabel 10 di bawah ini

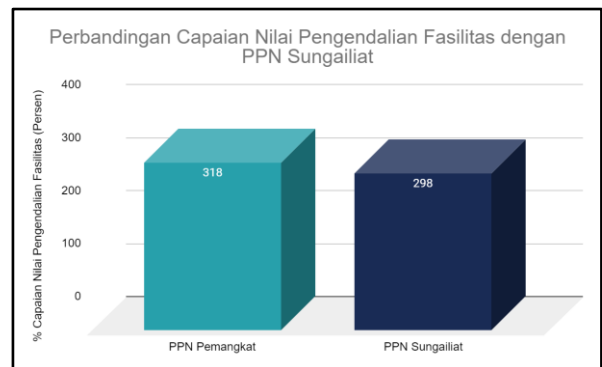
Tabel 10. Capaian IK Nilai Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (Persen)

SS-4				Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas PPN Pemangkat yang Optimal							
IKU-7				Nilai Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (Persen)							
Realisasi Triwulan I				2024				Renstra 2020-2024			
2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2024	%Capaian thd Target 2024	
0	0	0	0	30,10	30,10	95,68	318	318	0	0	

Pada tahun 2024 PPN Pemangkat memiliki target IKU Nilai Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan sebesar 30,10, jika dibandingkan dengan target tahun lalu, mengalami kenaikan sebesar 0,9. Adapun target setiap triwulan sama dengan target tahunan yakni 30,10. Pada triwulan I 2024 ini tercapai nilai sebesar 95,68, atau dengan persentase sebesar 318%.

Dikarenakan IKU ini merupakan IKU baru ada pada triwulan IV 2023, maka capaian pada capaian pada triwulan ini tidak dapat dibandingkan dengan target pada renstra dan juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I pada kurun waktu tahun 2020 s.d. 2023.

Capaian IKU ini jika dibandingkan dengan standar nasional atau dengan UPT dalam satu WPP 711 (PPN Sungailiat) dapat



dilihat pada gambar berikut. Terlihat capaian Nilai Pengendalian Fasilitas pada PPN Pemangkat lebih tinggi jika dibanding dengan capaian pada PPN Sungailiat. Sesuai dengan surat dinas Direktur Kepelabuhanan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.B.1330/DJPT.4/PI.310/IV/2024, tanggal 16 April 2024, hal Capaian dan Hasil Evaluasi Implementasi SELARASKAN Triwulan I TA. 2024 di Pelabuhan Perikanan UPT Pusat, capaian PPN Pemangkat pada kategori Sangat Baik dengan peringkat kedua dari 22 UPT lingkup DJPT.

Keberhasilan PPN Pemangkat dalam IKU ini karena terpenuhinya dokumen yang diperlukan dalam standar penilaian pada Aplikasi Selaraskan. Secara berkala setiap bulan dilakukan monitoring pemenuhan dokumen dengan *lead* dari Tim Kerja TKPU.



Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU Pengendalian Pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan ini disebabkan karena keterlibatan seluruh SDM dari lintas Tim Kerja dalam pemenuhan dokumen penilaian Selaraskan. Pada tahun 2024 ini, pelaksanaan IKU Nilai Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan mendapat pagu anggaran sebesar Rp.178.750.000,00 dan sampai dengan akhir triwulan I telah terealisasi sebesar Rp. 16.490.000,00 atau dengan persentase serapan sebesar 9,23%. Kegiatan yang mendukung IKU ini adalah Pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan.

SS.5. Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di PPN Pemangkat

Terdapat 1 Indikator Kinerja (IK) pada Sasaran Kinerja 5 yaitu Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

IK. 8. Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

Indikator kinerja ini menunjukkan Jumlah kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat. Sesuai dengan manual IKU-nya, perhitungannya capaian pada triwulan I merupakan penjumlahan capaian pada tahun 2023 ditambah capaian pada triwulan I. Capaian indikator dapat dilihat pada tabel 11 berikut.

Tabel 11. Capaian IK Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

SS-5	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di PPN Pemangkat	
IKU-8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan	
Realisasi Triwulan I	2024	Renstra 2020-2024

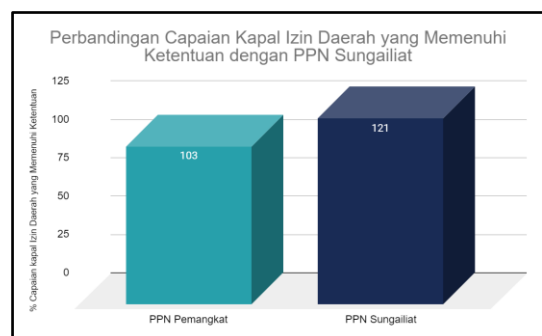
2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2024	%Capaian thd Target 2024
0	0	0	158	490	460	475	97	103	35	1.357

Diketahui bahwa capaian pada tahun 2023 adalah 450 kapal, capaian pada triwulan I adalah sebanyak 25 kapal, sehingga total capaian pada triwulan I 2024 adalah 475 kapal. Target tahunan adalah sebesar 490 kapal dan target triwulan sebesar 460 kapal. Sehingga jika dibandingkan dengan target tahunan maka persentase capaian sebesar 97% dan jika dibandingkan dengan target triwulan I maka persentasenya adalah 103%.



Pada triwulan I tahun 2023, jumlah sertifikat kelaikan kapal yang diterbitkan oleh PPN Pemangkat sebanyak 158 kapal. Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan I tahun 2023, maka terjadi lonjakan capaian sebagaimana tersaji pada gambar di atas. Dikarenakan IK ini merupakan IK baru pada tahun 2023, maka tidak dapat menyajikan data-data capaian pada tahun 2020 s.d. 2022.

Pada renstra, IK ini memiliki target sebanyak sebesar 35 kapal, capaian pada triwulan I 2024 ini telah melampaui target renstra. Jika dibandingkan dengan capaian pada PPN Sungailiat, persentase capaian PPN Pemangkat lebih rendah sebagaimana tersaji pada gambar berikut



Tingkat ketercapaian IK ini dikarenakan patuhnya kapal perikanan dalam mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) sebelum masa berlakunya berakhir. Disamping itu, dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1569/MEN-KP/X/2023 tentang Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Pada Tahun 2023, sangat membantu pemilik

kapal karena pemilik kapal dapat mengajukan pembaruan SKKP tanpa proses pemeriksaan kelaikan dan masa berlaku SKKP tersebut lebih panjang dari sebelumnya hingga sampai dengan 31 Desember 2024. Disamping itu, tingkat capaian ini dipengaruhi banyaknya pengajuan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) dari kapal perikanan izin daerah yang berada di Pelabuhan Binaan seperti PP Kuala Singkawang, PPP Sungai Rengas, dan PP Sungai Kakap. SKKP merupakan salah satu dokumen persyaratan dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Dalam mendukung pencapaian IKU dokumen kapal perikanan yang diterbitkan didukung dengan tim SKKP yang terdiri dari 1 orang penanggung jawab, 1 orang koordinator dan 5 orang verifikator. Kesemuanya masuk kedalam surat tugas kepala Pelabuhan Nomor B.2152/PPN.PMK/KP.440/VIII/2023. Guna mendukung kegiatan pada IKU ini diberikan pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 12.770.000,00 untuk mengakomodir kegiatan penerbitan sertifikat kapal perikanan.

SS.6. Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di PPN Pemangkat

Terdapat 1 Indikator Kinerja (IK) pada Sasaran Kinerja 5 yaitu Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)

IK. 9. Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan persentase awak kapal perikanan yang bersertifikasi kompetensi layak laut, layak tangkap dan layak simpan serta yang memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Adapun formula perhitungannya adalah persentase jumlah awak kapal yang memiliki PKL atau e-PKL dan telah tersertifikasi dibandingkan dengan seluruh jumlah awak kapal yang memiliki PKL atau e-PKL. Sesuai dengan manual IKU, pelaporan IK ini bersifat tahunan, sehingga belum dapat tersaji datanya pada laporan triwulan I.

Tabel 12. Capaian IK Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan

SS-6				Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di PPN Pemangkat							
IKU-9				Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)							
Realisasi Triwulan I				2024				Renstra 2020-2024			
2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2024	%Capaian thd Target 2024	
-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	

Dikarenakan pelaporannya bersifat tahunan maka tidak dapat dibandingkan dengan target triwulan I 2024, target tahunan 2024, tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun-tahun sebelumnya dan tidak dapat dibandingkan juga target renstra. Secara serempak IK ini dilaporkan secara tahunan oleh seluruh UPT lingkup DJPT, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada PPN Sungailiat.

Pelaksanaan Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi dan Asistensi Buku Pelaut bagi Awak Kapal Perikanan dan E-PKL. Faktor yang penentu keberhasilan capaian yaitu kesadaran nelayan sebagai pelaku utama dan pemilik kapal sebagai pelaku usaha, ketersediaan petugas kesyahbandaran sebagai fasilitator Perjanjian Kerja Laut (PKL). Petugas telah melaksanakan PKL dengan beberapa nelayan yang difasilitasi oleh PPN Pemangkat. Keberhasilan Sosialisasi terkait perlindungan awak kapal perikanan oleh Tim Kerja Kesyahbandaran PPN Pemangkat dan antusiasme nelayan dan kesadaran terkait risiko kerja di kapal perikanan menyebabkan banyaknya nelayan mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan. Juga andil pemilik kapal mengajak diskusi seluruh ABK kapalnya agar mau menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang kemudian disahkan oleh Syahbandar di PPN Pemangkat. Sehingga persentase Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan mencapai target.

Pagu anggaran yang disiapkan untuk mendukung kelancaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.13.000.000, anggaran tersebut untuk mendukung Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuannya/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan

SS.7 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pemangkat

IK. 10. Nilai PM Pembangunan ZI PPN Pemangkat

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Indikator kinerja ini merupakan penilaian pembangunan ZI menuju WBK yang mencakup 6 (enam) area pengungkit dan 2 (dua) area komponen hasil yang mengacu kepada Juknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan data dukung berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Tabel 13. Capaian IK Nilai PM Pembangunan ZI PPN Pemangkat

SS-7				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pemangkat							
IKU-10				Nilai PM Pembangunan ZI PPN Pemangkat							
Realisasi Triwulan I				2024					Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2024	%Capaian thd Target 2024	
-	-	-	-	80	-	-	-	-	75,07	-	

IKU Nilai PM Pembangunan ZI PPN Pemangkat sesuai dengan manual IKU, pelaporannya bersifat tahunan, sehingga belum ada capaian pada triwulan I. Begitu juga dengan tahun tahun sebelumnya, pelaporan capaian ini adalah tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada triwulan I tahun-tahun sebelumnya. Mengacu pada target renstra, target pada tahun 2024 adalah sebesar 75,07, target ini lebih kecil dibandingkan dengan target tahunan. Belum dapat dibandingkan capaiannya dengan target pada renstra.

Pola perhitungan dan pelaporan IKU ini serentak dilakukan secara tahunan oleh semua UPT lingkup DJPT, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada UPT lain.

Dalam mendukung pencapaian IKU ini, didukung dengan anggaran dan sumber daya manusia. Pagu anggaran yang disediakan untuk mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.32.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.6.351.100,00 atau dengan persentase 19,85%.

Dalam pelaksanaan ZI WBK di PPN Pemangkat, terdapat beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan IKU tersebut, antara lain:

1. Adanya rapat yang dilakukan secara berkala agar terkontrolnya progress pemenuhan data dukung;
2. Adanya pengerjaan dokumen data dukung yang sesuai dengan apa yang telah disyaratkan dalam LKE;
3. Terlaksananya kegiatan-kegiatan yang menujung Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.

IK. 11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Pemangkat

Indikator kinerja ini merupakan hasil pengawasan Itjen kepada PPN Pemangkat berdasarkan LHP yang telah terbit pada triwulan IV 2023 s.d. triwulan I 2024 yang telah ditindaklanjuti oleh PPN Pemangkat dan menjadi objek pengawasan. Adapun sampai dengan akhir 2023 capaiannya adalah sebagai berikut

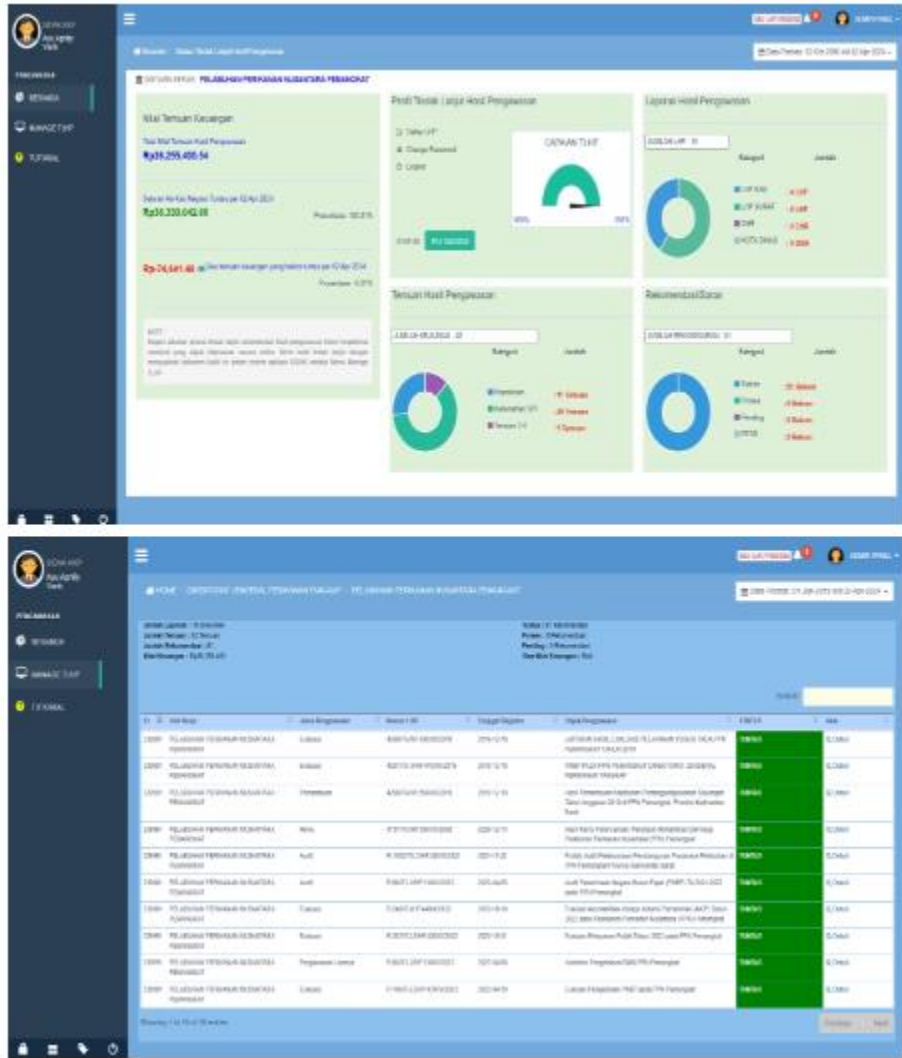
Tabel 14. Capaian IK Persentasi Rekomendasi Hasil Pengawasan untuk Perbaikan Kinerja

SS-7				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pemangkat							
IKU-11				Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Pemangkat							
Realisasi Triwulan I				2024				Renstra 2020-2024			
2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2024	%Capaian thd Target 2024	
0	0	0	0	80	80,0	100,0	125	125	0	0	

Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2024 dari target yang telah ditetapkan sebesar 80 berhasil dicapai dengan realisasi sebesar 100 dengan persentase sebesar 125%. Target tahunan maupun target triwulan memiliki besaran yang sama, sehingga

persentase capaiannya sama yakni 125%. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada triwulan I tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan perbedaan periode pelaporan dengan tahun tahun sebelumnya. Capaian ini juga tidak dapat dibandingkan dengan target renstra.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Digunakan untuk Perbaikan Kinerja didukung oleh penyelesaian tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Nomor tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan tentang Evaluasi Pelayanan Publik. Semua data dukung sesuai rekomendasi pada LHP Inspektorat Tersebut tersebut diatas telah disampaikan ke Inspektorat Jenderal dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Secara umum, sampai dengan akhir triwulan I 2024 tidak ada kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini. Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu menindaklanjuti seluruh temuan dan saran hasil evaluasi/pengawasan Inspektorat Jenderal serta melakukan koordinasi secara intensif kepada Inspektorat Jenderal dan DJPT. Berikut gambar yang didapat dari aplikasi SIDAK KKP dan rekapitulasi data sisa temuan dan tindak lanjut pada triwulan IV 2023.



Rekapitulasi Sisa Temuan Hasil Pengawasan Inspektoral Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, Ditjen Perikanan Tangkap

No	Pengawasan	Salah	Nomor LHP	Laporan Hasil Pengawasan	Sebelum Tindak Lanjut			Tindak Lanjut			Setelah Tindak Lanjut		
					Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OKTOBER 2023													
NILAI													
NOVEMBER 2023													
NILAI													
DESEMBER 2023													
NILAI													

Jika dibandingkan dengan capaian pada IKU yang sama dengan beberapa UPT lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka capaian PPN Pemangkat masih berada di atas rata-rata capaian.

Dalam mendukung pencapaian IKU ini, didukung dengan sumber daya manusia dalam bentuk tim pengelolaan kinerja dan tim pelayanan publik. Kegiatan koordinasi dan konsultasi terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dilakukan secara online dan pemenuhan dokumen diunggah pada *google drive* sehingga lebih efektif dan

efisien baik dari segi sumber daya manusia dan waktu penyelesaiannya. Adapun dari segi anggaran kegiatan ini tidak terdapat anggaran dikarenakan sudah menggunakan Aplikasi sidak.kkp.go.id dalam pengawasan dan tindak lanjut.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Barang Milik Negara (BMN) (Perjalanan dalam rangka penyelesaian dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil audit lingkup DJPT). Pada tahun 2024 ini, untuk melaksanakan kegiatan tersebut mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 8.300.000,00. Sampai dengan akhir triwulan I 2024 belum ada realisasinya.

IK. 12. Nilai Rekonsiliasi Kinerja PPN Pemangkat (Nilai)

Rekonsiliasi kinerja merupakan proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja KKP, menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan sebagai sarana pendampingan terhadap eselon II DJPT untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik. Terdapat 4 aspek penilaian diantaranya adalah aspek kepatuhan (bobot 25%), aspek kesesuaian (bobot 25%), aspek ketercapaian (bobot 30%), dan aspek ketepatan (20%). Capaian indikator kinerja ini dihitung dari hasil penilaian atas implementasi SAKIP di DJPT dengan menggunakan instrumen Kertas Kerja Rekonsiliasi sesuai ketentuan yang berlaku. Capaian indikator ini tersaji pada tabel 15 berikut

Tabel 15. Capaian IK Nilai Rekonsiliasi Kinerja

SS-7				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pemangkat							
IKU-12				Nilai Rekonsiliasi Kinerja PPN Pemangkat							
Realisasi Triwulan I				2024					Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2024	%Capaian thd Target 2024	
-	-	-	-	94	-	-	-	-	-	-	

Belum ada capaian IKU ini pada triwulan I, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target triwulan I 2024, target tahunan, target triwulan I tahun-tahun sebelumnya dan dengan target pada renstra.

Secara serentak pelaporan IKU ini dilaksanakan pada periode tertentu, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada UPT lain lingkup DJPT pada triwulan I ini.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat telah menggunakan Aplikasi E-sakip Reviu dalam penyampaian dokumen pemenuhan SAKIP, serta telah dilakukan reviu secara berkala terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan dokumen SAKIP ditentukan oleh kualitas dan pemanfaatan informasi kinerja pada unit kerja, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran melalui E-SAKIP yang terintegrasi, dan kualitas monev kinerja serta pemanfaatan hasil monev kinerja sebagai umpan balik perbaikan/peningkatan akuntabilitas kinerja. Hambatan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah belum adanya pengumpulan data secara rutin dan tepat waktu sehingga menghambat proses penyusunan Laporan Kinerja. Langkah yang akan dilakukan antara lain menyelenggarakan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan melakukan sosialisasi dan dialog kinerja kepada seluruh pegawai.

Dalam mendukung ketercapaian IKU ini didukung oleh sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Dari segi anggaran, telah disediakan pagu anggaran sebesar Rp.39.000.000,00 untuk kegiatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi dan telah terealisasi sebesar Rp.3.985.400,00 atau dengan persentase serapan sebesar 10,22%. Adapun sumber daya manusia untuk mendukung terlaksananya kegiatan ini dibentuk Surat Perintah Tim Pengelola Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang terdiri dari unsur penanggung jawab masing-masing IKU.

Program yang menunjang capaian indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja yaitu program dukungan manajemen–layanan manajemen keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Upaya yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja pada tahun 2024 yaitu meningkatkan pemanfaatan informasi kinerja pada unit kerja dalam pengelolaan kinerja dan penganggaran sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*. Mengintegrasikan aplikasi e-SAKIP untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran lingkup KKP serta peningkatan kualitas monev Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai, evaluasi

program dan evaluasi akuntabilitas kinerja dan memanfaatkan secara optimal hasil monev untuk umpan balik perbaikan peningkatan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pelaksanaan program.

IK. 13. Indeks Profesionalitas ASN PPN Pemangkat (Persen)

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indikator Indeks Profesionalitas ASN adalah salah satu cara untuk mendekati kualitas ASN dengan menggunakan Indeks komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independent. Penilaian indikator ini berdasarkan penilaian pada website ropeg .kkp.go.id yang diukur menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, diukur dari Riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari di bawah SLTA sampai dengan Pendidikan S-3;
2. Kompetensi, diukur dari Riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi: Diklat, Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara;
3. Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja; dan Disiplin Pegawai, diukur dari Riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Berikut adalah capaian indikator IP ASN PPN Pemangkat 2023 (Tabel 16)

Tabel 16. Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN PPN Pemangkat

SS-7				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pemangkat							
IKU-13				Indeks Profesionalitas ASN PPN Pemangkat							
Realisasi Triwulan I				2024					Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2024	%Capaian thd Target 2024	
-	-	-	-	84	-	-	-	-	79	-	

Capaian IKU ini dilaporkan pada triwulan II dan IV 2024, sehingga belum dapat dibandingkan dengan target tahunan, target triwulan I dengan capaian triwulan I tahun-tahun sebelumnya maupun dengan target pada renstra. Juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada satker lain dikarenakan periode pelaporannya serentak di triwulan II dan triwulan IV 2024. Mengacu pada website ropeg.kkp.go.id, capaian IP ASN PPN Pemangkat pada triwulan I adalah 65 (Kategori Rendah). Tim Kerja Dukungan Manajerial telah mengakomodir peningkatan IP ASN Pegawai PPN Pemangkat melalui berbagai diklat. Komitmen keterlibatan pimpinan dalam pencapaian IP ASN diturunkan melalui memorandum Kepala Pelabuhan Nomor 134/PPN.PMK/KP.510/V/2024, tanggal 14 Mei 2024 tentang Perintah Mengikuti Pengembangan Kompetensi.

Dalam mendukung pencapaian IKU ini didukung oleh keaktifan dan partisipasi semua pegawai, dengan penanggung jawab IKU adalah 2 orang pengelola kepegawaian. Dari sisi anggaran, untuk mendukung IKU ini dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai, Gaji dan Tunjangan dan Peningkatan layanan publik dan operasional pelabuhan dengan pagu anggaran sebesar Rp.5.642.836.000,00, telah terealisasi sebesar Rp. 1.378.690.041,00.

IK. 14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Pemangkat (Nilai)

Indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
3. Laporan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa (20%); dan
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Berikut adalah capaian persentase Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di PPN Pemangkat 2023 (Tabel 17).

Tabel 17. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa

SS-7				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pemangkat							
IKU-14				Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Pemangkat							
Realisasi Triwulan I				2024				Renstra 2020-2024			
2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2024	%Capaian thd Target 2024	
-	-	-	-	80	-	-	-	-	75	-	

Capaian IKU ini dilaporkan pada triwulan IV 2024, sehingga belum dapat dibandingkan dengan target tahunan, target triwulan I dengan capaian triwulan I tahun-tahun sebelumnya maupun dengan target pada renstra. Juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada satker lain dikarenakan periode pelaporannya serentak di triwulan IV 2024.

Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa telah melakukan identifikasi kegiatan Barang/Jasa pada akhir tahun 2023 sehingga pelaksanaan pengadaan barang jasa dapat sesuai dan tepat sasaran. Indikator ini menitikberatkan pada ketepatan waktu pelaporan dan kesesuaian kelengkapan dokumen yang diunggah pada aplikasi SIRUP dan kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang/jasa di PPN Pemangkat. Pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki kedudukan berarti dalam penerapan pembangunan nasional guna meningkatkan pelayanan publik serta mengembangkan perekonomian baik nasional maupun daerah. Seiring berkembangnya situasi kondisi perekonomian dunia maupun dalam negeri yang tidak menentu, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) serta kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan dan penerapan tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Kegiatan perencanaan pada tahun 2023 direviu oleh UK PBJ KKP dan Inspektorat Jenderal sehingga proses tender memerlukan waktu yang lebih lama. Dengan adanya reviu perencanaan pengadaan barang/jasa sehingga dokumen tender menjadi *valid*. Proses pengadaan barang sudah dilakukan dengan menyesuaikan jenis dan spesifikasinya yang memenuhi komponen TDKN melalui *e-purchasing* sehingga dapat diproses sesuai peraturan yang berlaku. Langkah yang akan dilaksanakan yaitu melaksanakan koordinasi terkait *reviu* perencanaan ke UK PBJ KKP dan Inspektorat Jenderal.

Dalam mendukung ketercapaian IKU ini, SDM yang terlibat adalah 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan 1 (satu) orang Pejabat Pembuat Komitmen. Keterbatasan SDM yang memiliki sertifikat PBJ dan PPK sehingga pelaksanaan keduanya ditugaskan pada pegawai dengan jabatan fungsional P3T dan AP3T yang telah memiliki sertifikat tersebut. Dalam hal anggaran, IKU ini diberikan pagu anggaran sebesar Rp. 4.896.000,00 untuk melaksanakan kegiatan Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor (Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa). Sampai dengan akhir triwulan I 2024, telah terealisasi sebesar Rp. 816.000,00 atau dengan persentase serapan sebesar 16,67%.

IK. 15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur sebagai berikut :

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 10%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 balik ke penggunaan barang dan pengelolaan barang (bobot 25%) ;
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (reevaluasi aset) (bobot 20%) ;
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal didukung Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Pemakaian (Bobot 25%); dan

5. Penyusunan Laporan BMN (semesteran dan tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%)

Berikut adalah capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN pada PPN Pemangkat

Tabel 18. Capaian IK Tingkat Kepatuhan BMN

SS-7				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pemangkat							
IKU-15				Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Pemangkat							
Realisasi Triwulan I				2024					Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2024	%Capaian thd Target 2024	
-	-	-	-	80	-	-	-	-	75	-	

Capaian IKU ini dilaporkan pada triwulan IV 2024, sehingga belum dapat dibandingkan dengan target tahunan, target triwulan I dengan capaian triwulan I tahun sebelumnya maupun dengan target pada renstra. Juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada satker lain dikarenakan periode pelaporannya serentak di triwulan IV 2024.

Hambatan dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu banyak BMN yang rusak berat tetapi masih tercatat pada SIMAK BMN dan belum dilakukan penghapusan. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu pelelangan barang dengan kondisi rusak berat melalui KPKNL. Serta telah ditetapkan PSP terhadap bangunan dan peralatan yang diadakan tahun 2023 dan melakukan inventarisasi BMN.

Pelaksanaan IKU ini didukung oleh sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Pagu anggaran yang disiapkan untuk mendukung IKU ini adalah sebesar Rp.4.320.000,00 , diperuntukan dalam kegiatan Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dan Barang Milik Negara (BMN) (Honorium pengurus/penyimpan BMN tingkat kuasa pengguna barang). Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp.720.000,00 , atau dengan persentase serapan sebesar 16,67%. Sumber daya manusia yang mendukung penuh IKU ini adalah 2 (dua) orang pengelola BMN dan dibantu oleh pegawai yang menangani sarana dan prasarana.

Kegiatan yang menunjang tercapainya indikator ini adalah Pelaporan Keuangan dan BMN. Inventarisasi BMN serta kegiatan lain berupa pemeliharaan, peningkatan nilai dari asset yang dilakukan oleh PPN Pemangkat. Melaksanakan penghapusan BMN setelah menerima Surat persetujuan penghapusan BMN, melakukan revisi RK BMN sesuai dengan kebutuhan organisasi.

IK. 16. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 13 (tiga belas) indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, Pagu Minus dan Konfirmasi Capaian Output. Perhitungan secara system pada aplikasi OM-SPAN yang mengacu pada lampiran Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor : ND-964/P33.2/2019, tanggal 29 Maret 2019. Berikut adalah capaian indikator tersebut pada 2024

Tabel 19. Capaian IK Nilai IKPA

SS-7				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pemangkat							
IKU-16				Nilai IKPA PPN Pemangkat							
Realisasi Triwulan I				2024					Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2024	%Capaian thd Target 2024	
-	-	-	-	93,760	-	-	-	-	89	-	

Capaian IKU ini dilaporkan pada triwulan IV 2024, sehingga belum dapat dibandingkan dengan target tahunan, target triwulan I dengan capaian triwulan I tahun-tahun sebelumnya maupun dengan target pada renstra. Juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada satker lain dikarenakan periode pelaporannya serentak di triwulan IV 2024.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan nilai IKPA yaitu melakukan revisi halaman III DIPA sesuai batas waktu yang ditentukan dan dilakukan

penyesuaian target serapan anggaran sesuai perhitungan target serapan setiap triwulan; melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi serapan anggaran; melaksanakan pendaftaran kontrak, penyelesaian tagihan *revolving* UP dan GUP serta mengajukan SPM dilakukan tepat waktu; serta pengisian capaian output dilakukan tepat waktu dan capaian realisasi output sesuai atau diatas target yang ditetapkan setiap triwulan.

Guna mendukung ketercapaian IKU ini, didukung oleh sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Pagu anggaran yang telah disediakan adalah sebesar Rp.119.100.000,00, diperuntukan untuk kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap, Operasional dan Pemeliharaan Kantor dan Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dan Barang Milik Negara (BMN). Sampai dengan akhir triwulan I 2024, telah terserap sebesar Rp.24.016.900,00 atau dengan persentase serapan sebesar 20,17%. Sumber Pencapaian IK ini didukung oleh 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Pranata Keuangan APBN dan 1 (satu) orang Analis Keuangan.

Kegiatan yang menunjang kinerja ini adalah kegiatan yang diperoleh dengan indikator revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Capaian Output, Retur SP2D, Renkas, dan Kesalahan SPM. Dilakukan penyesuaian halaman tiga DIPA setiap awal triwulan, melakukan monitoring terhadap penyampaian SPM dan data kontrak, serta penyampaian capaian output setiap tanggal 10 pada bulan berjalan.

IK. 17 Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)

Kinerja anggaran merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Dasar pengukuran Nilai Kinerja Anggaran menggunakan PMK No.22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L dengan bobot penilaian capaian output 43,5%, efisiensi 28,6%, konsistensi

penyerapan anggaran terhadap perencanaan 18,2%, dan penyerapan anggaran 9,7%. Berikut adalah tabel capaian IKU tersebut (Tabel 20)

Tabel 20. Capaian IK Nilai Kinerja Anggaran

SS-7				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pemangkat							
IKU-17				Nilai Kinerja Anggaran PPN Pemangkat							
Realisasi Triwulan I				2024				Renstra 2020-2024			
2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2024	%Capaian thd Target 2024	
-	-	-	-	86	-	-	-	-	88	-	

Capaian IKU ini dilaporkan pada triwulan IV 2024, sehingga belum dapat dibandingkan dengan target tahunan, target triwulan I dengan capaian triwulan I tahun-tahun sebelumnya maupun dengan target pada renstra. Juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada satker lain dikarenakan periode pelaporannya serentak di triwulan IV 2024.

Faktor pendukung tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran yaitu adanya peningkatan nilai penyerapan anggaran, konsistensi, capaian realisasi output, efisiensi dan nilai efisiensi. Faktor penghambat pencapaian Nilai Kinerja Anggaran yaitu efisiensi dan nilai efisiensi dengan perbandingan capaian output dengan penyerapan anggaran. Rencana tindak lanjut dengan mengoptimalkan penyerapan anggaran dengan cara meningkatkan nilai capaian output setiap komponen realisasi output.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber Pencapaian IK ini didukung oleh 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Pranata Keuangan APBN dan 1 (satu) orang Analis Keuangan. Dari segi anggaran, untuk kelancara kegiatan pendukung IKU ini telah disiapkan pagu sebesar Rp.61.000.000,00 , diperuntukan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran. Sampai dengan akhir triwulan I 2024, telah terealisasi sebesar Rp. 3.771.000,00 atau dengan persentase serapan sebesar 6,18%.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas adalah kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.

IK. 18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup PPN Pemangkat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)/ diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP. Adapun sampai dengan akhir triwulan I 2024, capaiannya IKU sebagaimana tabel 21 berikut.

Tabel 21. Capaian IK Nilai SKM

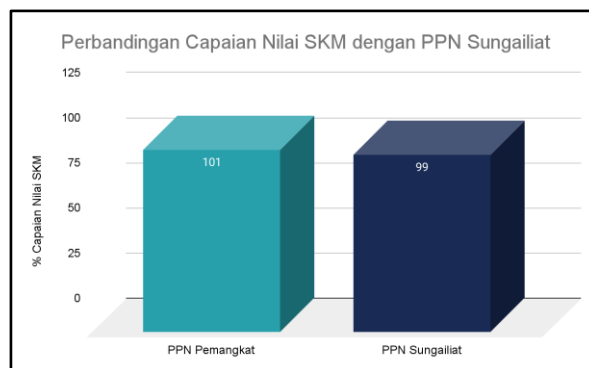
SS-7				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pemangkat							
IKU-18				Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup PPN Pemangkat							
Realisasi Triwulan I				2024					Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2024	%Capaian thd Target 2024	
0	0	0	0	88,3	88,3	89,4	101	101	0	0	

Capaian SKM pada triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 89,4. Target yang telah ditentukan sebesar 88,3. Sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 101%. Target triwulan maupun target tahunan sama, sehingga persentase capaiannya sama

sebesar 101%. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan target renstra, dikarenakan IKU ini baru muncul di triwulan IV 2023.

Berdasarkan pencapaian realisasi, jika dibandingkan dengan PPN Sungailiat, maka gambarannya seperti gambar disamping

Nilai ini diperoleh atas upaya PPN Pemangkat dengan memperbaiki dan meningkatkan fasilitas, kompetensi SDM serta mendorong kepada setiap petugas layanan untuk selalu melakukan pengisian SKM pada setiap selesai melakukan pelayanan. Selain itu, petugas pelayanan juga wajib memberikan pendampingan



kepada pengguna jasa pada saat melakukan pengisian SKM sehingga tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam menjawab pertanyaan pada *form* SKM.

Guna mendukung kegiatan didukung oleh 17 petugas pelayanan dan dibentuk SK Tim yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SKM 2024. Disamping itu juga adanya penambahan SDM (PNS dan PPPK) sehingga beberapa pelayanan yang dahulu hanya ditangani 1 orang, saat ini dapat dilaksanakan oleh beberapa orang dan berakibat pada peningkatan pelayanan yang menjadi lebih baik

Kegiatan yang menunjang tercapainya indikator ini antara lain; (1) Melakukan peningkatan fasilitas, (2) Membentuk tim yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan SKM dan (3) Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan SKM kepada petugas dan pengguna jasa.

3.5. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri dari efisiensi sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Efisiensi penggunaan sumber daya telah diupayakan dan dilaksanakannya pembagian tugas pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pegawai dalam menunjang setiap indikator kinerja. Berikut adalah efisiensi penggunaan anggaran perjenis kegiatan sampai dengan akhir tahun 2023.

Tabel 22. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Kegiatan Pendukung di RKAKL	Per Indikator Kinerja Utama			Per Sasaran Kinerja		
			Anggaran/Pagu (Rp)	Realisasi	%	Anggaran/Pagu (Rp)	Realisasi	%
Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Sosialisasi SOP jasa kepelabuhan di Pelabuhan Perikanan	117.900.000,00	31.560.500,00	26,77	117.900.000,00	31.560.500,00	26,77
Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Evaluasi Pelaksanaan PNBP Pasca Produksi dan Penangkapan Ikan Terukur di Pelabuhan Perikanan	137.148.000,00	21.123.100,00	15,40	234.792.000,00	21.123.100,00	9,00
		Penyelenggaraan, pengolahan dan validasi data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	18.000.000,00	-	0,00			

		Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	79.644.000,00	-	0,00			
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang berdaya Saing	Persentase Permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Pelaksanaan Pengusahaan di Pelabuhan Perikanan	41.790.000,00	-	0,00	549.469.000,00	30.773.100,00	5,60
	Tingkat Kinerja Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat	Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan	71.430.000,00	11.476.000,00	16,07			
		Pelaksanaan tata kelola dan operasional cara penanganan ikan yang baik (CPIB) dan Inspeksi Pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan	29.140.000,00	177.500,00	0,61			
		Penerapan ISO 9001:2015 di Pelabuhan Perikanan	24.110.000,00	-	0,00			
		Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan)	8.000.000,00	1.200.000,00	15,00			

		Sarana penunjang pemungutan PNBP Pelabuhan Perikanan	70.000.000,00	-	0,00			
	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Pelaksanaan Tata kelola dan Operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan	231.472.000,00	14.371.000,00	6,21			
		Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan	31.570.000,00	-	0,00			
		Pengumpulan dan Verifikasi Data Log Book penangkapan Ikan	41.957.000,00	3.548.600,00	8,46			
Pengembangan dan Peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang Optimal	Persentase Pengendalian pengembangan Fasilitas pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	472.000.000,00	40.630.662,00	8,61	1.684.268.000,00	119.100.662,00	7,07

		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	883.107.000,00	61.980.000,00	7,02			
		Pengadaan dan Rehabilitasi prasarana perkantoran	150.411.000,00	-	0,00			
	Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan	178.750.000,00	16.490.000,00	9,23			
Pengelolaan Kapal Perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi Ketentuan	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	25.000.000,00	12.770.000,00	51,08	38.000.000,00	12.770.000,00	33,61

Pengelolaan Awak Kapal perikanan yang Tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/awak Kapal perikanan	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	13.000.000,00	-	0,00			
Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Nilai PM ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Pelaksanaan zona integritas	32.000.000,00	6.351.100,00	19,85	9.415.433.000,00	2.026.076.204,00	21,52
	Persentase Rekomendasi Hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dan Barang Milik Negara (BMN) (Perjalanan dalam rangka penyelesaian dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil audit lingkup DJPT)	8.300.000,00	-	0,00			
	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	39.000.000,00	3.985.400,00	10,22			
	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai	49.990.000,00	-	0,00			
		Gaji dan Tunjangan	5.445.678.000,00	1.378.690.041,00	25,32			

		Peningkatan layanan publik dan operasional pelabuhan	147.168.000,00	-	0,00			
	Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor (Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa)	4.896.000,00	816.000,00	16,67			
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dan Barang Milik Negara (BMN) (Honorium pengurus/penyimpan BMN tingkat kuasa pengguna barang)	4.320.000,00	720.000,00	16,67			
	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dan Barang Milik Negara (BMN)	119.100.000,00	24.016.900,00	20,17			
	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap	61.000.000,00	3.771.000,00	6,18			
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Pelaksanaan SKM pelayanan publik	8.120.000,00	2.020.000,00	24,88			
		Forum konsultasi publik	10.570.000,00	-	0,00			
		Operasional Perkantoran	2.577.981.000,00	546.991.163,00	21,22			

		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	328.740.000,00	36.179.900,00	11,01		
		Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	205.276.000,00	17.296.000,00	8,43		
		Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	253.280.000,00	-	0,00		
		Pengadaan sarana perkantoran	96.304.000,00	-	0,00		
		Forum Kehumasan dan kegiatan PPID	23.710.000,00	5.238.700,00	22,09		

BAB IV PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Dalam mewujudkan Pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah direncanakan. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan I tahun 2024, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur. Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran program dan target pada Indikator Kinerja selama triwulan I tahun 2024. Terhadap capaian Indikator Kinerja tersebut dilakukan analisis dan evaluasi, serta perbandingan terhadap target tahunan dan capaian Indikator Kinerja pada tahun sebelumnya, target akhir Renstra, dan capaian satker lain sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan. Capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat triwulan I tahun 2024 secara keseluruhan dinyatakan tercapai melebihi target yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja triwulan I tahun 2024 ini ada beberapa permasalahan, yakni

- Kurang efektif-efisiennya sistem pas masuk yang masih menggunakan sistem manual dan
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana dan Pengaduan.

3.2. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI SEBELUMNYA

Rekomendasi perbaikan pada periode sebelumnya (triwulan IV 2024) telah ditindaklanjuti pada periode ini dengan

- Petugas mulai mengencarkan sosialisasi dan pendekatan dengan pengurus kapal untuk menyalurkan kebutuhan air bersihnya melalui penyaluran air SWRO dan

- Melakukan koordinasi dengan Bagian Program DJPR serta melakukan penyesuaian perhitungan untuk IKU Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Pemangkat pada manual IKUnya.

3.3. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Berdasarkan kendala dan permasalahan yang terjadi selama pencapaian kinerja triwulan I 2024, beberapa rekomendasi/hal-hal yang disarankan untuk peningkatan kinerja sebagai berikut

- Perlu adanya peningkatan sistem pas masuk mengguankan portal semi otomatis;
- Kegiatan peningkatan pelayanan publik dan operasional pelabuhan; dan
- Mensosialisasikan Penanganan Pengaduan Online Melalui Whatsapp